

**UPAYA PENANGANAN SENGKETA TUMPANG TINDIH
(OVERLAPPING) SERTIFIKAT HAK TERHADAP SUATU BIDANG
TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM**

Oleh

I Gusti Putu Ery Aditya Purna, NIM 2114101195

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Tanah merupakan obyek yang paling mudah terkena sengketa, banyaknya sengketa yang terjadi saat ini disebabkan karena berbagai macam persoalan masyarakat salah satunya yaitu sengketa (*overlapping*) mengenai kepemilikan hak terhadap suatu bidang tanah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah yang terindikasi tumpang tindih (*overlapping*) di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penanganan sengketa tumpang tindih (*overlapping*) sertifikat hak terhadap suatu bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem dan (2) faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tumpang tindih (*overlapping*) sertifikat hak terhadap suatu bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Sampel dipilih menggunakan teknik *Non-Probability Sampling* melalui *Purposive Sampling*, yakni penunjukan subjek penelitian yang dianggap representatif bagi populasi studi. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) sertifikat hak atas tanah adalah cacat administrasi, dan proses penyelesaian sengketa tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Kata Kunci : Hak Bidang Tanah, Sengketa, Pertanahan, Tumpang Tindih

**EFFORTS TO HANDLING DISPUTES REGARDING LAND
RIGHTS CERTIFICATES AT THE LAND OFFICE
OF KARANGASEM REGENCY**

By

I Gusti Putu Ery Aditya Purna, NIM 2114101195

Legal Studies Program

ABSTRACT

Land is the object most prone to disputes, and the large number of disputes occurring today is due to various social issues, one of which is overlapping disputes regarding ownership rights to a particular piece of land. This study was conducted with the aim of understanding the process of resolving overlapping land disputes at the Karangasem District Land Office. This study aims to determine (1) the handling of overlapping disputes over land ownership rights at the Karangasem District Land Office and (2) the factors causing overlapping disputes over land ownership rights at the Karangasem District Land Office. This study applies an empirical legal research method with a descriptive approach. The sample was selected using non-probability sampling through purposive sampling, which is the selection of research subjects considered representative of the study population. The data obtained was then processed and analyzed using qualitative-descriptive methods. The results of the study indicate that the main cause of overlapping land title certificates is administrative flaws, and the process of resolving such disputes at the Karangasem District Land Office refers to Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Regulation No. 21 of 2020 on the Handling and Resolution of Land Cases.

Keywords: *Land Rights, Disputes, Land Affairs, Overlapping*